RELASI POLITIK PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN POLITIK : ANALISIS KONSEPTUAL TENTANG PENGARUH KEKUASAAN TERHADAP ARAH DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Olga Yosnita Sari[1], Fikhri Husaini[2], Muhiddinul Kamal[3]

[1,2,3]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : olgayosnita02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual hubungan antara politik dan pendidikan di Indonesia serta pengaruh kekuasaan terhadap kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini menelaah literatur akademik, jurnal ilmiah, dan regulasi pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat relasi timbal balik antara kekuasaan politik dan arah pendidikan. Pendidikan sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan penyebaran ideologi penguasa, sementara pendidikan juga berpotensi meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap struktur kekuasaan. Pergantian pemerintahan sering diikuti perubahan kebijakan, seperti kurikulum dan program nasional, yang menunjukkan politisasi dalam sistem pendidikan. Desentralisasi juga memunculkan politik lokal baru yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga independensi pendidikan dari kepentingan politik untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kata Kunci : *Politik Pendidikan, Kekuasaan, Kebijakan Pendidikan, Relasi Sosial, Pendidikan Indonesia.*

PENDAHULUAN

Dinamika politik dan kekuasaan dapat berdampak besar pada bidang pendidikan di Indonesia. Arah kebijakan pendidikan nasional selalu mengikuti konfigurasi kekuasaan politik yang berkuasa sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi dan pemerintahan modern. Pendidikan dilihat tidak hanya sebagai cara untuk meningkatkan sumber daya manusia, tetapi juga sebagai alat politik untuk menciptakan ideologi, legitimasi kekuasaan, dan pencitraan publik tentang pemerintah. Politik pendidikan mengacu pada kebijakan, strategi, dan keputusan yang dibuat oleh penguasa terkait dengan manajemen sistem pendidikan. Pemerataan akses pendidikan, pendanaan, dan perumusan kurikulum adalah bagian darinya.(Tilaar, 2002) Nurcholish Madjid(Madjid, 1992) mengatakan pendidikan politik adalah proses mendidik warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan nasional dan global. Mereka berhubungan erat satu sama lain: pendidikan membentuk kesadaran politik masyarakat, dan politik menentukan arah pendidikan.

Dalam dunia modern, terutama selama lima tahun terakhir (2020–2025), perubahan kurikulum, kebijakan redistribusi guru ASN, dan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN menunjukkan kekuatan politik pemerintah pada agenda politik nasional.(Sugiyarti, 2025) Fenomena ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan tidak hanya teknokratis, itu juga memiliki aspek politik dan ideologis. Pendidikan tidak pernah berada di posisi netral. Ia selalu bergerak di ruang kekuasaan yang penuh dengan ideologi, keuangan, dan kepentingan politik. Politik pendidikan di Indonesia mencerminkan bagaimana pemerintah menggunakan sistem pendidikan untuk membentuk karakter negara sesuai dengan ideologi negara, sementara pendidikan politik berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

Di Indonesia, politik dan pendidikan sangat terkait, dan kebijakan pendidikan secara langsung dipengaruhi oleh kekuasaan. Dalam praktiknya, pendidikan merupakan salah satu area strategis yang sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan elit kekuasaan. Akibatnya, proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan sering reflek dari dinamika politik yang berlangsung di tingkat nasional.(Damanhuri, Shodikin, Yacub, Permatasari, & Kholijah, 2024) Sangat penting untuk diingat bahwa masalah-masalah tersebut bukan hanya kesalahan individu tertentu; mereka mencerminkan masalah yang ada di sistem pendidikan Indonesia. Karena mereka terlibat langsung dalam proses pendidikan, pendidik dan sistem pendidikan sangat penting dalam situasi ini. Pemerintah memiliki kendali penuh atas sistem pendidikan karena itu adalah produk dari kebijakannya. Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan nilai-nilai pendidikan di masyarakat, dan wewenang ini dapat berdampak besar pada perkembangan pendidikan. Sejarah pendidikan Indonesia melewati berbagai tahap, mulai dari kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan, dan reformasi. Tujuan utama pendidikan selama masa kolonial Belanda adalah untuk menyediakan tenaga kerja murah untuk mendukung eksploitasi kolonial. Hal ini ditunjukkan oleh pengumpulan pajak dan praktik kerja paksa (Daendels 1808 M) yang sangat menyengsarakan penduduk asli, terutama orang Islam.(Damanhuri et al., 2024)

Dalam teori pemerintahan, pendidikan menjadi indikator utama yang menentukan arah perkembangan suatu bangsa; banyak kepentingan politik yang telah menggunakan pendidikan untuk mengubah kondisi bangsa menuju kemajuan. Sebuah kekuasaan yang ingin bertahan lama dalam pemerintahannya harus mengawasi kurikulum sekolah.(Chamelia Putri & Salito, 2024) Tidak hanya masyarakat tidak memiliki kekuatan politik untuk menghentikan pengaruh ini,

mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari secara konseptual bagaimana hubungan politik dan kekuasaan membentuk kebijakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, ia akan melihat bagaimana hal itu berdampak pada sistem dan praktik pendidikan secara keseluruhan. Salah satu masalah terkini yang terkait dengan hubungan antara politik pendidikan, kebijakan pendidikan, kekuasaan, dan bagaimana hal itu berdampak pada praktik pendidikan di institusi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

Politik Pendidikan: Proses membuat keputusan dan menerapkan kebijakan pendidikan termasuk dalam politik pendidikan. Kepentingan politik tertentu dapat memengaruhi kebijakan pendidikan, tergantung pada situasi politik negara tersebut. Ini dapat berdampak pada pembiayaan, program studi, dan peraturan institusi pendidikan Islam.

Kebijakan Pendidikan: Institusi pendidikan Islam dapat dipengaruhi langsung oleh kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Kebijakan tentang kurikulum, ujian standar, dan akreditasi, misalnya, dapat mempengaruhi cara institusi mengatur program mereka.

Kontrol dan Kekuasaan: Dalam hal pendidikan, entitas yang memiliki otoritas seperti pemerintah, badan pengawas pendidikan, atau entitas lain dapat memiliki otoritas. Kontrol atas institusi pendidikan Islam dapat memengaruhi cara mereka bekerja, termasuk memilih guru, membuat kurikulum, dan menetapkan tujuan pendidikan.

Implikasi pada Praktik Pendidikan: Keterkaitan ini dapat memiliki banyak konsekuensi. Misalnya, lembaga pendidikan Islam mungkin perlu mengubah kurikulum mereka untuk memenuhi tuntutan pemerintah tentang kurikulum sekuler nasional. Selain itu, perubahan kebijakan dan politik juga dapat berdampak pada institusi pendidikan, infrastruktur, dan akses terhadap sumber daya.

Tantangan Dengan Kebebasan Akademik: Di lembaga pendidikan Islam, kebebasan akademik dapat diganggu oleh hubungan antara politik, kebijakan, dan kekuasaan. Ada kemungkinan bahwa penekanan pada ideologi atau perspektif politik tertentu akan membatasi kemampuan guru dan siswa untuk mengeksplorasi, mempertanyakan, atau mengembangkan ide secara bebas.

Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Politik: Lembaga pendidikan Islam kadang-kadang juga dapat berperan sebagai aktor politik atau tempat di mana siswa dididik dengan prinsip politik tertentu. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang netralitas pendidikan serta peran institusi tersebut dalam membentuk perspektif politik siswa.(Dahyanti, Diastami, Humaira, & Darmansah, 2025)

Pada upayanya untuk mendorong penelitian politik pendidikan sebagai metode teoretis untuk memahami hubungan antara kekuasaan dan orientasi kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka akademik baru untuk membangun strategi kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada kemanusiaan, keadilan, dan kemajuan bangsa dengan menggunakan analisis konseptual berbasis penelitian lembaga pustaka. Sangat penting untuk memahami bahwa hubungan antara politik pendidikan, kebijakan, kekuasaan, dan praktik pendidikan di institusi pendidikan Islam dapat sangat kompleks dan beragam tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya di mana institusi tersebut beroperasi. Akibatnya, makalah ini akan membahas hubungan antara politik pendidikan, kebijakan, kekuasaan, dan praktik pendidikan di institusi pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis hubungan antara politik dan pendidikan di Indonesia. Studi ini dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur akademik seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan tema relasi politik dan kekuasaan dalam sistem pendidikan nasional. Langkah pertama dari pendekatan ini adalah menemukan dan memilih literatur yang membahas pengaruh kekuasaan terhadap arah dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data dengan meninjau teori yang mendukung analisis relasi politik dan pendidikan, serta materi, temuan, dan temuan penelitian sebelumnya yang mendukung analisis tersebut.

Penulis secara sistematis memetakan dinamika politik yang mempengaruhi pendidikan selama proses analisis, mulai dari aspek kebijakan, penyusunan kurikulum, hingga efeknya terhadap profesionalisme guru dan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya, semua data dan informasi yang diperoleh diperiksa secara menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk sampai pada kesimpulan tentang pola-pola pengaruh kekuasaan serta kesulitan untuk membuat kebijakan pendidikan yang independen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan agar proses penyusunan kebijakan lebih berpihak pada pengembangan pendidikan yang baik dan berkeadilan sosial daripada hanya kepentingan politik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi arah dan kebijakan pendidikan nasional di Indonesia

Politik berasal dari kata *politic* yang dalam bahasa Inggris, Latin, atau Yunani berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan, atau rencana negara. Menurut ahli seperti Deliar Noer dan Miriam Budiardjo, politik mengacu pada bagaimana sistem politik menetapkan dan melaksanakan tujuan melalui kekuasaan, otoritas, dan pengaruh dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam pendidikan melalui kebijakan, arah, dan pengelolaan pendidikan, yang sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan orientasi kekuasaan yang berkuasa. Baik secara historis maupun saat ini, kekuasaan politik memengaruhi kebijakan dan arah pendidikan nasional Indonesia melalui berbagai mekanisme dan intervensi. Kurikulum ditetapkan dan diubah sesuai dengan kepentingan politik. Foucault (Foucault, 1977) mengatakan bahwa pengetahuan dan disiplin memungkinkan kekuasaan. Sekolah menjadi arena kontrol sosial di mana prinsip-prinsip tertentu diterapkan untuk menghasilkan subjek yang patuh. Pendidikan sering diubah saat pergantian rezim, yang memungkinkan para penguasa menerapkan ideologi dan pesan politik tertentu agar sesuai dengan agenda kekuasaan mereka. Sebagai contoh, kurikulum dirancang untuk mendukung stabilitas politik dan kekuasaan selama Orde Baru.

Semua keputusan tentang anggaran pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah politik, termasuk kebijakan strategis tentang alokasi anggaran, penunjukan pejabat pendidikan, dan peraturan yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi politik penguasa. Sentralisasi dan desentralisasi pendidikan: Pada masa Orde Baru, terjadi sentralisasi yang kuat, yang berarti pemerintah pusat mengatur langsung berbagai kebijakan. Desentralisasi pendidikan

dimulai pada tahun 1999, setelah reformasi dan keluarnya UU Otonomi Daerah. Namun, masalah baru muncul karena banyak daerah tidak memiliki sumber daya keuangan dan moral yang memadai; korupsi, baik di pusat maupun daerah, juga sering terjadi.(Chamelia Putri & Salito, 2024)

Dengan membuat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) dan kebijakan turunan seperti kurikulum dan program wajib belajar, pemerintah dan elite politik memainkan peran penting dalam menentukan arah pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan sering diubah saat pemimpin politik berubah, tetapi kadang-kadang tidak berkesinambungan dan lebih fokus pada tujuan baru pemerintah daripada kebutuhan pendidikan jangka panjang. Dengan hubungan yang erat antara pendidikan dan kekuasaan politik, pendidikan dapat menjadi alat bagi kepentingan kekuasaan, bahkan kadang-kadang menjauhkan pendidikan dari tujuannya, yaitu memberikan kebebasan berpikir dan kemandirian kepada siswa. Ini berarti peran negara harus diubah agar pendidikan lebih fokus pada kepentingan bangsa daripada politik. Oleh karena itu, kekuasaan politik sangat memengaruhi cara pendidikan di Indonesia dilihat. Ini menghadirkan tantangan tersendiri untuk memastikan bahwa pendidikan dilakukan secara demokratis, adil, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan politik.

Kekuasaan politik memiliki peran fundamental dalam menentukan arah, isi, serta prioritas kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai instrumen politik yang strategis untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan dan membentuk ideologi negara. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa setiap pergantian rezim politik hampir selalu diikuti dengan perubahan arah dan kebijakan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan di Indonesia sering kali tidak sepenuhnya otonom, melainkan berada dalam orbit kepentingan politik yang sedang berkuasa.

Secara teoritis, hubungan antara politik dan pendidikan dapat dijelaskan melalui teori *hegemoni* Antonio Gramsci yang menyatakan bahwa kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya bukan hanya melalui dominasi ekonomi dan politik, tetapi juga lewat penguasaan ideologi melalui lembaga pendidikan. Dalam konteks Indonesia, kurikulum pendidikan dan sistem pengajaran kerap menjadi wahana untuk menanamkan nilai-nilai ideologis yang sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Misalnya, pada masa Orde Lama, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan anti-imperialisme yang sejalan dengan semangat revolusi. Sementara pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan alat untuk melanggengkan stabilitas politik dan menanamkan ideologi tunggal Pancasila melalui program Penataran P4 (*Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*) serta kurikulum yang sangat terpusat di bawah kontrol negara.

Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru juga menunjukkan bagaimana kekuasaan politik berupaya mengontrol struktur birokrasi pendidikan secara vertikal. Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kurikulum, pengangkatan guru, dan penetapan anggaran. Sentralisasi kekuasaan pendidikan ini menimbulkan ketergantungan yang kuat terhadap kebijakan pusat, sehingga lembaga pendidikan kehilangan otonomi dalam merancang sistem pembelajaran yang kontekstual dengan kebutuhan daerah. Bahkan, dalam praktiknya, pejabat pendidikan sering kali dipilih berdasarkan loyalitas politik, bukan kompetensi profesional. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola pendidikan dan terhambatnya proses inovasi akademik di sekolah maupun perguruan tinggi.

Memasuki era Reformasi, paradigma kekuasaan dalam pendidikan mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Desentralisasi ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang dan mengelola kebijakan pendidikan sesuai karakteristik wilayahnya. Namun demikian, dalam praktiknya, desentralisasi juga membuka peluang munculnya "politik lokal pendidikan" yang baru, di mana elit daerah menggunakan kekuasaan pendidikan untuk kepentingan politik praktis seperti pengangkatan kepala sekolah, distribusi anggaran, dan promosi jabatan fungsional pendidik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, tetap menjadi variabel dominan dalam mengarahkan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Dalam perspektif kebijakan publik, pendidikan di Indonesia sering kali tidak dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat (evidence-based policy), melainkan lebih pada kepentingan politik jangka pendek. Misalnya, perubahan kurikulum yang terjadi berulang kali dalam dua dekade terakhir mulai dari Kurikulum 1994, 2004 (KBK), 2006 (KTSP), 2013 (K-13), hingga Kurikulum Merdeka (2022) menunjukkan adanya ketidakkonsistenan arah kebijakan yang dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan politik. Setiap pemerintahan cenderung ingin meninggalkan "warisan kebijakan" melalui reformasi kurikulum tanpa melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas implementasi kurikulum sebelumnya. Akibatnya, sistem pendidikan nasional menjadi inkonsisten dan membingungkan bagi guru serta peserta didik yang menjadi subjek utama kebijakan tersebut.

Selain pada ranah kurikulum, kekuasaan politik juga memengaruhi kebijakan penganggaran pendidikan. Walaupun UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) telah mengamanatkan bahwa minimal 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, realisasinya sering kali tidak mencerminkan pemerataan dan efektivitas penggunaan dana. Banyak anggaran terserap untuk kepentingan administratif dan proyek-proyek politik yang bersifat simbolik, seperti pembangunan infrastruktur sekolah yang tidak diimbangi peningkatan kualitas guru. Politik anggaran ini menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi arena perebutan sumber daya ekonomi dan legitimasi kekuasaan, bukan semata ruang pengabdian pada pembangunan sumber daya manusia.

Kekuasaan politik juga berpengaruh dalam pembentukan wacana ideologis di ruang pendidikan. Negara melalui kebijakan pendidikan berusaha mengatur narasi nasionalisme, moralitas, dan kewarganegaraan yang harus diajarkan kepada peserta didik. Pada satu sisi, hal ini penting untuk menjaga integrasi nasional; namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengarah pada indoktrinasi politik yang mengekang kebebasan berpikir. Dalam beberapa kasus, guru dan dosen menjadi berhati-hati dalam menyampaikan materi yang bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah karena khawatir dianggap berseberangan dengan ideologi negara. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik dapat menekan kebebasan akademik dan menurunkan profesionalisme pendidik.

Selain itu, aspek politik dalam pendidikan juga terlihat dari proses rekrutmen dan promosi jabatan birokrasi pendidikan. Praktik patronase politik yang masih kuat membuat banyak posisi strategis di lembaga pendidikan ditempati oleh individu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, bukan karena prestasi akademik atau kinerja profesional. Akibatnya, kebijakan pendidikan sering diwarnai oleh kompromi dan kepentingan kelompok tertentu. Fenomena ini berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas publik dan menghambat terwujudnya pemerintahan pendidikan yang bersih dan berorientasi pelayanan.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, kekuasaan politik juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap fungsi pendidikan. Ketika pendidikan dijadikan alat mobilisasi politik, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap netralitas lembaga pendidikan. Sekolah dan universitas yang seharusnya menjadi tempat pengembangan ilmu dan karakter justru terjebak dalam pusaran kepentingan ideologis dan pragmatis. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan prinsip *educational governance* yang transparan, akuntabel, dan bebas intervensi politik agar lembaga pendidikan dapat menjalankan fungsinya secara independen.

Upaya mengembalikan pendidikan sebagai ruang publik yang bebas dari dominasi politik memerlukan reformasi struktural dan kultural secara bersamaan. Secara struktural, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang menjamin otonomi lembaga pendidikan, kebebasan akademik, serta profesionalisme guru. Hal ini termasuk mempertegas batasan antara peran politik dan peran administratif dalam pengelolaan pendidikan. Secara kultural, masyarakat perlu didorong untuk memandang pendidikan bukan sebagai alat politik, tetapi sebagai hak dasar yang harus dijamin negara tanpa diskriminasi dan manipulasi kekuasaan.

Dalam kerangka pendidikan Islam, hubungan kekuasaan politik dengan pendidikan memiliki dimensi moral dan spiritual yang lebih dalam. Pendidikan Islam menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Oleh karena itu, politisasi pendidikan dalam perspektif Islam dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Dalam konteks ini, kekuasaan seharusnya berperan sebagai pelindung dan fasilitator proses pendidikan, bukan sebagai instrumen dominasi ideologis.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan politik di Indonesia memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap arah serta kebijakan pendidikan nasional. Pengaruh ini tampak dalam berbagai aspek, mulai dari penentuan kurikulum, alokasi anggaran, struktur birokrasi, hingga pembentukan wacana ideologis dalam pendidikan. Meskipun reformasi dan desentralisasi telah memberikan ruang bagi otonomi yang lebih besar, praktik politisasi masih terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Tantangan utama bagi pendidikan Indonesia ke depan adalah bagaimana membangun sistem yang otonom, profesional, dan berkeadilan, di mana kebijakan pendidikan benar-benar berorientasi pada kepentingan peserta didik dan kemajuan bangsa, bukan pada kekuasaan politik yang bersifat sementara.

2. Bagaimana dinamika relasi antara penguasa dan lembaga pendidikan memengaruhi perkembangan pendidikan di indonesia.

Sejarah panjang dan berubah-ubah hubungan antara pemerintah dan lembaga pendidikan di Indonesia membentuk jalan dan karakteristik pendidikan negara. Pendidikan telah menjadi alat politik dan kekuasaan sejak kolonial. Bukan untuk mencerdaskan seluruh rakyat, pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan pendidikan sebagai cara untuk mendukung sistem kolonial dan mencetak tenaga kerja yang patuh. Berbeda dengan sekolah menengah dan tinggi, sekolah pribumi hanya menawarkan pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pada masa itu diskriminatif dan berfokus pada kepentingan penguasa.

Hubungan antara pemerintah dan lembaga pendidikan berubah menjadi alat untuk membentuk identitas dan pembangunan bangsa setelah kemerdekaan. Pemerintah Indonesia mulai mengintegrasikan pendidikan ke dalam pembangunan negara mereka. Kurikulum dirancang untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, nilai moral Pancasila, dan semangat gotong royong.(Aksan, 2022) Namun demikian, keterlibatan negara yang kuat dalam urusan pendidikan juga sering

menyebabkan konflik antara kontrol politik pemerintah dan otonomi lembaga pendidikan. Misalnya, pada era Orde Baru, ideologi tunggal Pancasila ditanamkan dalam pendidikan melalui program Penataran P4 dan kurikulum yang sangat terpusat. Di satu sisi, hal ini bekerja dengan baik untuk menciptakan stabilitas sosial, tetapi di sisi lain, hal ini membatasi kebebasan berpikir dalam konteks akademik.

Memasuki era reformasi, hubungan antara lembaga pendidikan dan para penguasa mulai berubah. Kebijakan otonomi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) pemerintah memberi daerah dan institusi pendidikan lebih banyak kekuasaan. Ini mendorong inovasi dalam pengajaran dan penelitian karena perguruan tinggi memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengelola akademik dan keuangan. Meskipun demikian, masalah baru seperti komersialisasi pendidikan dan ketimpangan akses menunjukkan bahwa hubungan antara penguasa dan institusi pendidikan masih berkembang dan perlu diubah untuk memastikan keadilan sosial dan pemerataan pendidikan.(Kartika, 2017)

Secara keseluruhan, dinamika yang terjadi dalam hubungan antara penguasa dan lembaga pendidikan menunjukkan bahwa ideologi dan kepentingan politik selalu memengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara kontrol pemerintah dan kebebasan lembaga pendidikan untuk memastikan sistem pendidikan yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada manusia.

Relasi antara penguasa dan lembaga pendidikan di Indonesia merupakan cerminan dari hubungan dialektis antara kekuasaan dan pengetahuan. Sejarah panjang bangsa ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak pernah berdiri sepenuhnya bebas dari intervensi politik. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, hubungan antara pemerintah dan lembaga pendidikan selalu bergerak dalam pola tarik-menarik antara kontrol negara dan upaya mempertahankan otonomi akademik. Dinamika ini berperan besar dalam menentukan arah, karakter, dan kualitas sistem pendidikan nasional.

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan didesain sebagai alat kontrol sosial dan ekonomi. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah yang membedakan antara anak-anak pribumi dan Eropa, dengan tujuan mencetak tenaga kerja murah yang loyal terhadap kepentingan kolonial. Pendidikan bukan ditujukan untuk mencerdaskan bangsa, melainkan untuk memperkuat struktur kekuasaan penjajah. Dampak dari sistem pendidikan kolonial ini masih terasa hingga kini, terutama dalam bentuk kesenjangan akses dan stratifikasi sosial dalam pendidikan.

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya mengubah orientasi pendidikan menjadi alat pembangunan nasional. Lembaga pendidikan mulai diarahkan untuk memperkuat ideologi Pancasila, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan membentuk karakter warga negara yang setia kepada negara. Namun, di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kontrol terhadap lembaga pendidikan melalui kebijakan yang sentralistik. Hal ini paling tampak pada era Orde Baru, di mana pendidikan dijadikan sarana indoktrinasi ideologis dan politik stabilitas. Pemerintah secara langsung mengawasi kurikulum, rekrutmen tenaga pendidik, serta kegiatan organisasi mahasiswa. Kebijakan seperti Penataran P4, mata pelajaran PMP, dan kurikulum yang homogen menunjukkan bahwa pendidikan telah dimanfaatkan untuk menjaga legitimasi kekuasaan.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam perubahan hubungan antara penguasa dan lembaga pendidikan. Otonomi daerah dan kebebasan akademik yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 membuka peluang bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan manajemen internal yang lebih mandiri. Perguruan tinggi mulai diberi status Badan Layanan Umum (BLU) atau bahkan Badan Hukum Pendidikan (BHP), sehingga memiliki

keleluasaan dalam pengelolaan akademik dan keuangan. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi komersialisasi pendidikan, di mana lembaga pendidikan dipaksa untuk mencari sumber dana mandiri melalui biaya kuliah yang tinggi dan kerja sama industri. Dalam kondisi ini, kekuasaan ekonomi justru menggantikan dominasi kekuasaan politik, sehingga pendidikan masih belum sepenuhnya merdeka.

Selain itu, relasi penguasa dan lembaga pendidikan juga mengalami dinamika baru di tingkat lokal. Desentralisasi pendidikan memunculkan peran kepala daerah dan pejabat dinas pendidikan sebagai aktor politik yang berpengaruh besar terhadap pengelolaan sekolah. Dalam beberapa kasus, pengangkatan kepala sekolah, mutasi guru, dan distribusi anggaran dilakukan berdasarkan pertimbangan politik, bukan profesionalitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan kemandirian, melainkan melahirkan bentuk baru dari politisasi pendidikan di tingkat daerah.

Meskipun demikian, lembaga pendidikan tetap memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan sosial. Banyak sekolah dan universitas yang berupaya mempertahankan integritas akademiknya dengan mengembangkan kurikulum yang kritis, riset yang berorientasi solusi sosial, serta memperjuangkan kebebasan berpikir di kalangan mahasiswa. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi ruang resistensi terhadap dominasi kekuasaan politik, sebagaimana dicontohkan oleh peran perguruan tinggi dalam gerakan reformasi dan advokasi kebijakan publik.

Dengan demikian, dinamika relasi antara penguasa dan lembaga pendidikan di Indonesia bersifat kompleks dan paradoksal. Di satu sisi, kekuasaan negara dibutuhkan untuk menjamin arah pembangunan pendidikan nasional; namun di sisi lain, kontrol politik yang berlebihan dapat menghambat otonomi, kreativitas, dan kebebasan akademik. Tantangan utama ke depan adalah bagaimana membangun keseimbangan yang sehat antara kontrol negara dan independensi lembaga pendidikan agar sistem penddikan Indonesia dapat berkembang secara demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

3. Sejauh mana intervensi kekuasaan berdampak pada otonomi lembaga pendidikan dan profesionalitas pendidik.

Intervensi adalah tindakan atau upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, dan khusus untuk mengubah sistem, proses, atau individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Intervensi dalam pendidikan merujuk pada berbagai strategi dan program yang bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran, mengatasi tantangan, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Intervensi dapat mencakup pendampingan individu, peningkatan kurikulum, pelatihan guru, penggunaan teknologi pendidikan, atau program yang dirancang khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Intervensi pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan kognitif, tetapi juga pada pengembangan moral siswa, pengembangan sosial-emosional, dan pembentukan karakter mereka. Kesesuaian dengan konteks lokal, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan intervensi.(Novi Wahyu Winastuti dan Wahyu Noverahela, 2007)

Salah satu dampak yang paling signifikan adalah politisasi profesi guru. Ketika guru berada di bawah tekanan politik, mereka dapat menjadi kurang independen dalam menjalankan tugas profesionalnya. Contoh tekanan politik ini termasuk keterlibatan politik dalam proses rekrutmen, promosi, atau mendukung kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat menyebabkan moral, dorongan, dan kualitas pengajaran guru menurun, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini melemahkan sikap kritis dan kemandirian profesional guru serta menghambat kemajuan profesional mereka. Selain itu, intervensi ini dapat menyebabkan

kolusi, birokrasi yang kaku, konflik kepentingan, dan praktik-praktik buruk lainnya yang merusak tata kelola sekolah dan menurunkan kualitas layanan siswa.

Dampak pada otonomi lembaga pendidikan, yaitu:

a. Jika ada intervensi kekuasaan, manajemen pendidikan seharusnya memiliki lebih banyak kebebasan untuk menentukan kebijakan dan strategi pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan standar.
b. Sentralisasi dan kekuasaan politik menyebabkan birokrasi yang kaku dan dapat menyebabkan korupsi, nepotisme, dan kolusi di sektor pendidikan.
c. Kebijakan sering mengikuti kepentingan politik penguasa pusat dan daerah, membatasi autonomi lembaga pendidikan.(Shah & Sirozi, 2024)

Dampak pada profesionalitas pendidik, yaitu:

a. Jika penguasa lokal mengontrol guru melalui kooptasi politik, mereka kehilangan autonomi dalam melakukan pekerjaan mereka dan melemahkan profesionalisme mereka.
b. Karena tekanan politik, sikap kritis dan kreatif guru menurun. Ini menghambat kemajuan profesi dan kualitas pengajaran.
c. Dalam beberapa kasus, politik pengambilan hati telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan guru; namun, kondisi ini tetap terhalang oleh politisasi yang dapat mengaburkan tujuan profesionalisme guru yang sebenarnya.(Zubir, 2014)

Secara keseluruhan, intervensi kekuasaan membahayakan otonomi lembaga pendidikan dan profesionalitas guru karena mengurangi kebebasan pengelolaan dan menghalangi guru untuk berkembang secara profesional. Akibatnya, pendidikan menjadi lebih buruk secara keseluruhan. Jadi, intervensi kekuasaan politik membatasi otonomi lembaga pendidikan dan mengancam profesionalitas guru, jika tidak dikelola dengan baik, kualitas dan kualitas pendidikan akan menurun.

4. Faktor kekuasaan apa yang paling dominan dalam menentukan prioritas dan visi pendidikan nasional.

Politik pemerintah dan birokrasi yang mengendalikan kebijakan pendidikan adalah faktor yang paling dominan dalam menentukan prioritas dan visi pendidikan nasional di Indonesia. Politik pemerintah mempengaruhi arah perkembangan sistem pendidikan melalui kebijakan yang dibuat untuk menciptakan nilai dan aspirasi warga negara sesuai dengan kepentingan negara, seperti pengalokasian anggaran pendidikan, pengaturan sumber daya pendidikan, struktur sekongkolan, dll. Selain itu, elemen birokrasi yang sentralistis dan dominasi kekuasaan sangat memengaruhi kontrol sistem pendidikan dan kurikulum. Dalam pendidikan, birokrasi ini sering menciptakan hierarki dan ketidaksetaraan, dan membatasi inovasi dan kreativitas. Keyakinan politik yang kuat di institusi pendidikan dapat menyebabkan indoktrinasi dan seragamisasi budaya. Akibatnya, kearifan lokal dan daya kritis masyarakat pendidikan akan hilang.(Hengki, Tjalla, & Sarifah, 2023) Pendidikan politik menumbuhkan kesadaran kritis dari bawah ke atas, berbeda dengan politik pendidikan yang biasanya dilakukan dari atas ke bawah.(Freire, 1970) Pendidikan seharusnya membebaskan orang dari kebodohan politik dan mendidik mereka untuk menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan terlibat dalam kebijakan publik.

Faktor politik dan kekuasaan ini seringkali tercermin dalam perubahan visi pendidikan yang terjadi seiring pergantian pemerintahan dan dinamika kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan konsistensi kebijakan pendidikan yang berkualitas, adil, dan relevan dengan kebutuhan masa depan Indonesia. Kemauan politik atau *political will* juga sangat penting.(Hengki et al., 2023) Dengan kata lain, prioritas dan visi

pendidikan nasional dibentuk oleh politik eksekutif dan legislatif, serta mekanisme birokrasi pemerintah. Ini mengarahkan pendidikan ke arah pembentukan karakter yang sejalan dengan kepentingan penguasa negara dan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah, yang menerapkan kebijakan pusat di tingkat lokal, dan para pemimpin pendidikan, seperti kepala sekolah dan guru, yang menerapkan kebijakan tersebut di lapangan, adalah aktor kekuasaan lain yang sangat penting. Namun, faktor utama dalam menetapkan visi dan prioritas pendidikan Indonesia adalah kekuasaan politik yang dominan di seluruh negeri.

KESIMPULAN

Kebijakan dan arah pendidikan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hubungan politik dan kekuasaan. Penguasa sering menggunakan pendidikan sebagai alat politik untuk mempertahankan kuasa mereka, yang menyebabkan kebijakan pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kebutuhan pendidikan dasar. Hal ini menyebabkan guru tidak memiliki profesionalisme yang cukup dan lembaga pendidikan tidak memiliki otonomi yang cukup. Ini juga menyebabkan kebijakan pendidikan yang tidak berkelanjutan dan mungkin hanya bersifat temporer. Sentralisasi kebijakan dan politisasi pendidikan menyebabkan perbedaan antara standar pendidikan nasional dan bagaimana hal itu dilakukan di lapangan. Terlepas dari upaya yang dilakukan untuk mereformasi dan memperbaiki kurikulum, masalah utama tetap terletak pada bagaimana mengatur hubungan antara kekuasaan dan pendidikan sehingga pendidikan menjadi merata dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Aksan, R. (2022). Kekuasaan dan Politik Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, *10*(1), 17. https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i1.6898

Chamelia Putri, P., & Salito, S. (2024). Dinamika Kekuasaan, Politik dalam Pendidikan: Implikasi Terhadap Transformasi Sosial dalam Manajemen Pendidikan di Era Industri 5.0. *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, *3*(1), 14. https://doi.org/10.30659/budai.3.1.14-20

Dahyanti, N., Diastami, S. M., Humaira, A., & Darmansah, T. (2025). Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Problematika Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *2*, 87–100.

Damanhuri, D., Shodikin, S., Yacub, J., Permatasari, E., & Kholijah, S. (2024). Keterkaitan Antara Politik Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Dan Kekuasaan Serta Implikasiny Pada Praktek Pendidikan Di Lembaga Pendidikan (Islam). *Jurnal Pengembangan Profesi Guru*, *2*(1–14), 2588–2593.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison.* (Pantheon). New York.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed* (Continuum.). New York.

Hengki, Y., Tjalla, A., & Sarifah, I. (2023). Bangsa (Kekuasaan) Terhadap Konstruksi, *6*, 2467–2471.

Kartika, Q. (2017). Dinamika Lembaga Pendidikan Mempertahankan Eksistensi Pada Era Kompetitif. *Journal of Islamic Education Management*, *3*(1), 112–131. Retrieved from http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare

Madjid, N. (1992). *Islam: Doktrin dan Peradaban.* (Paramadina). Jakarta.

Novi Wahyu Winastuti dan Wahyu Noverahela. (2007). Intervensi Psikologis Dalam Program Pengajaran Individual (PPI).

Shah, S., & Sirozi, M. (2024). Politisasi Profesi Guru Oleh Pemerintah Daerahstudi Kasus Di Kabupaten Banyuasin Iii. *Pendas : Jurnal Ilmiah PendidikanDasar*, *09*(3), 802–818.

Sugiyarti, N. (2025). Pengertian politik, kebijakan, dan pendidikan di Indonesia. *Civitas: Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic*, *7*(2), 81–94.

Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia.* (Remaja Ros). Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, (1).

Zubir, Z. (2014). Sistem Otonomi Pendidikan, *14*(1), 44–50.